



Post-Election Economic Policy Changes: Implications and Challenges for Business in Indonesia

Aris Sarjito

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Aris Sarjito arissarjito@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Business Implications, Challenges, Post-Election Economic Policy Changes, Strategy

Received : 27, March

Revised : 20, April

Accepted: 25, May

©2024 Sarjito: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research explores the impact of post-election economic policy changes on the business world in Indonesia, identifies challenges and opportunities, and recommends adaptation strategies for policymakers and the business world. This study uses qualitative analysis and secondary data from various theoretical perspectives, including Public Choice Theory, Economic Policy Uncertainty Theory, Institutional Theory, Transaction Cost Economics, Resource Dependency Theory, and Strategic Management Theory. This research explores the impact of post-election economic policy changes on businesses, the challenges they face in adapting, and the strategies they can use to mitigate these impacts and take advantage of opportunities. This research provides a comprehensive analysis of post-election economic policy changes in Indonesia, with a focus on strategies for the business world to face policy uncertainty and dynamic market conditions.

Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu: Implikasi dan Tantangan bagi Bisnis di Indonesia

Aris Sarjito

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Aris Sarjito, arissarjito@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implikasi Bisnis, Tantangan, Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu, Strategi

Received : 27, Maret

Revised : 20, April

Accepted: 25, Mei

©2024 Sarjito: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu terhadap dunia usaha di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merekomendasikan strategi adaptasi bagi pembuat kebijakan dan dunia usaha. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif dan data sekunder dari berbagai sudut pandang teori, antara lain Teori Pilihan Publik, Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi, Teori Kelembagaan, Ekonomi Biaya Transaksi, Teori Ketergantungan Sumber Daya, dan Teori Manajemen Strategis. Penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu terhadap dunia usaha, tantangan yang mereka hadapi dalam beradaptasi, dan strategi yang dapat mereka gunakan untuk memitigasi dampak tersebut dan memanfaatkan peluang. Penelitian ini memberikan analisis menyeluruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia, dengan fokus pada strategi bagi dunia usaha untuk menghadapi ketidakpastian kebijakan dan kondisi pasar yang dinamis.

PENDAHULUAN

Setelah transisi demokrasi seperti pemilihan umum, perubahan kebijakan ekonomi sering terjadi, membentuk lanskap bisnis suatu negara. Esai ini menggali perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia dan implikasi serta tantangannya bagi bisnis yang beroperasi di dalam negeri. Dengan memeriksa penelitian terbaru dan karya ilmiah, esai ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan ekonomi yang berkembang dan dampaknya terhadap lingkungan bisnis di Indonesia.

Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu di Indonesia

Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan pemain kunci di kawasan Asia Tenggara, mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi setelah pemilu. Studi terbaru telah menyoroti dinamika perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia setelah pemilu. Misalnya, penelitian oleh Siregar & Miyazaki, (2020) menekankan peran siklus politik dalam membentuk kebijakan ekonomi pasca pemilu. Mereka berpendapat bahwa siklus pemilihan sering menyebabkan perubahan dalam kebijakan fiskal dan moneter, mempengaruhi kepercayaan bisnis dan keputusan investasi. Selain itu, penelitian Kuncoro & Resosudarmo (2018) menunjukkan bahwa tren global dan kondisi ekonomi eksternal serta faktor politik domestik berdampak pada perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia. Hal ini menyoroti keterkaitan ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi global dan perlunya pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor domestik dan internasional dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Implikasi untuk Bisnis

Perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia memiliki implikasi signifikan bagi bisnis yang beroperasi di negara ini. Salah satu implikasi utama adalah ketidakpastian dan volatilitas dalam lingkungan bisnis. Penelitian oleh Nugroho (2019) menunjukkan bahwa perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan ekonomi setelah pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian bagi bisnis, yang menyebabkan keraguan dalam rencana investasi dan ekspansi. Ketidakpastian ini merusak kepercayaan bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu sering mengakibatkan pergeseran dalam kerangka peraturan dan kondisi bisnis. Penelitian oleh (Utama & Rosadi, 2021) menyoroti tantangan yang dihadapi oleh bisnis dalam beradaptasi dengan perubahan peraturan, terutama di sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti energi, infrastruktur, dan keuangan. Perubahan peraturan ini dapat berdampak pada persaingan pasar, akses ke sumber daya, dan biaya operasional untuk bisnis, menimbulkan tantangan bagi perusahaan domestik dan asing yang beroperasi di Indonesia.

Tantangan untuk Bisnis

Selain ketidakpastian dan tantangan regulasi, perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia menghadirkan tantangan khusus bagi

bisnis. Salah satu tantangan tersebut adalah perlunya kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam strategi bisnis. Penelitian (Pratama & Wibowo, 2020) menggarisbawahi pentingnya strategi bisnis agile yang dapat merespons secara efektif perubahan kebijakan ekonomi dan kondisi pasar. Bisnis perlu terus memantau perkembangan kebijakan dan menyesuaikan operasi, investasi, dan strategi manajemen risiko mereka. Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu dapat memperburuk masalah struktural yang ada dalam perekonomian Indonesia. Penelitian oleh (Hidayat, 2019) menunjukkan masih adanya kendala struktural seperti kemacetan infrastruktur, inefisiensi birokrasi, dan kekakuan pasar tenaga kerja, yang menghambat pertumbuhan dan daya saing bisnis. Mengatasi tantangan struktural ini membutuhkan upaya bersama dari pembuat kebijakan, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pernyataan Masalah

Setelah pemilu, Indonesia sering mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi lanskap bisnis negara ini. Namun, implikasi dan tantangan dari perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu ini untuk bisnis tetap belum dijelajahi. Memahami implikasi dan tantangan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan bisnis untuk menavigasi lingkungan ekonomi yang berkembang secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu terhadap bisnis Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam beradaptasi, dan mengeksplorasi strategi untuk mengurangi perubahan ini dan memanfaatkan peluang yang muncul di negara ini.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa implikasi spesifik dari perubahan kebijakan ekonomi pascapemilu bagi bisnis di Indonesia? Pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu terhadap bisnis yang beroperasi di Indonesia. Ini berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan peraturan berdampak pada berbagai sektor ekonomi, kepercayaan bisnis, keputusan investasi, persaingan pasar, dan perilaku konsumen. Dengan memahami implikasi ini, pembuat kebijakan dan bisnis dapat merumuskan strategi berdasarkan informasi untuk mengatasi tantangan potensial dan memanfaatkan peluang.
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh bisnis dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia? Pertanyaan penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh bisnis dalam menyesuaikan operasi,

investasi, dan strategi mereka dalam menanggapi perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu. Ini mengeksplorasi tantangan yang terkait dengan ketidakpastian peraturan, biaya kepatuhan, volatilitas pasar, akses ke keuangan, hambatan perdagangan, dan ketidakstabilan politik. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, pembuat kebijakan dan bisnis dapat mengembangkan intervensi yang ditargetkan dan strategi adaptif untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bisnis di Indonesia.

3. Strategi apa yang dapat digunakan bisnis untuk mengurangi dampak perubahan kebijakan ekonomi pascapemilu dan memanfaatkan peluang yang muncul di Indonesia? Pertanyaan penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi langkah-langkah proaktif dan strategi adaptif yang dapat diadopsi bisnis untuk menavigasi kompleksitas perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu secara efektif. Ini menyelidiki strategi seperti perencanaan skenario, manajemen risiko, diversifikasi, inovasi, kemitraan strategis, dan advokasi. Selain itu, mengkaji bagaimana bisnis dapat memanfaatkan peluang yang muncul yang timbul dari reformasi kebijakan, liberalisasi pasar, kemajuan teknologi, dan pergeseran preferensi konsumen. Dengan mengidentifikasi strategi yang efektif, bisnis dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkembang di tengah ketidakpastian kebijakan dan kondisi pasar yang dinamis di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pilihan Publik

Teori ini meneliti bagaimana aktor politik membuat keputusan berdasarkan memaksimalkan manfaat mereka, seperti pemilihan ulang, bukan semata-mata untuk kebaikan publik. Ini dapat membantu menganalisis bagaimana kebijakan pasca-pemilu dapat mencerminkan prioritas pemerintahan baru, yang berpotensi berdampak pada bisnis di sektor-sektor tertentu yang selaras dengan prioritas tersebut (Blais, 2000).

Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi

Teori ini menunjukkan bahwa ketidakpastian seputar perubahan kebijakan ekonomi dapat menyebabkan bisnis menunda investasi, mengurangi perekrutan, dan mengalami perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Menganalisis perubahan kebijakan melalui lensa ini dapat memberikan wawasan tentang dampak potensial pada kepercayaan bisnis dan keputusan investasi (Baker et al., 2016).

Teori Kelembagaan

Teori ini menekankan peran lembaga, seperti peraturan dan hukum, dalam membentuk perilaku ekonomi. Menganalisis perubahan kebijakan melalui lensa ini dapat mengungkapkan bagaimana peraturan baru dapat menciptakan ketidakpastian dan beban kepatuhan bagi bisnis, menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi (Scott, 2013).

Ekonomi Biaya Transaksi

Teori ini berfokus pada biaya yang terkait dengan melakukan transaksi bisnis. Memeriksa perubahan kebijakan melalui lensa ini dapat menyoroti potensi peningkatan biaya kepatuhan karena peraturan baru, yang berdampak pada profitabilitas dan daya saing bisnis (Williamson, 2007).

Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ini menunjukkan bahwa organisasi bergantung pada sumber daya eksternal untuk bertahan hidup dan tumbuh. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini untuk mengeksplorasi strategi seperti diversifikasi atau kemitraan strategis untuk mengamankan akses ke sumber daya penting yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan (Pfeffer & Salancik, 2015).

Teori Manajemen Strategis

Teori luas ini mencakup berbagai kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan kompetitif perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif. Ini dapat membantu bisnis mengembangkan perencanaan skenario, manajemen risiko, dan pendekatan inovasi untuk menavigasi ketidakpastian kebijakan dan memanfaatkan peluang yang muncul (Mintzberg et al., 2020).

METODOLOGI

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sekunder berfungsi sebagai metode yang berharga untuk menyelidiki fenomena kompleks dengan memanfaatkan dataset yang ada. Untuk menguji perubahan kebijakan ekonomi pascapemilu, implikasinya, dan tantangan bagi bisnis di Indonesia, esai ini mengeksplorasi penerapan metode penelitian kualitatif Creswell (2014) menggunakan data sekunder. Dengan memanfaatkan literatur, laporan, dan kumpulan data yang ada, para peneliti dapat memperoleh wawasan tentang dinamika multifaset perubahan kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan bisnis.

Tinjauan Metode Penelitian Kualitatif Menggunakan Data Sekunder

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok. Analisis data sekunder melibatkan pemeriksaan data yang ada yang dikumpulkan untuk tujuan selain studi peneliti saat ini. Menurut (Creswell, 2014), peneliti kualitatif dapat menggunakan analisis data sekunder untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pertanyaan penelitian, melengkapi data primer, atau mengeksplorasi jalan penelitian baru.

Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia, metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, mereka memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai dataset yang ada, termasuk laporan pemerintah, publikasi akademik, analisis industri, dan sumber media, memberikan liputan komprehensif tentang topik penelitian. Kedua, analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan studi longitudinal dan membandingkan tren dari waktu ke waktu, memfasilitasi identifikasi pola, perkembangan, dan perubahan dalam kebijakan ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis. Terakhir, analisis kualitatif data sekunder memungkinkan eksplorasi bernuansa faktor kontekstual, dinamika sosial, dan perspektif pemangku kepentingan yang membentuk perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu, memperkaya temuan penelitian dengan beragam sudut pandang. Penerapan Metode Penelitian Kualitatif Menggunakan Data Sekunder untuk Mempelajari Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu di Indonesia. Dalam konteks mempelajari perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia, metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dapat diterapkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Analisis Isi Dokumen dan Laporan Kebijakan: Peneliti dapat melakukan tinjauan komprehensif dan analisis isi dokumen kebijakan pemerintah, laporan legislatif, dan prakiraan ekonomi untuk mengidentifikasi perubahan, prioritas, dan tujuan kebijakan utama setelah pemilihan. Dengan memeriksa wacana dan bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, peneliti dapat melihat niat, alasan, dan strategi pembuat kebijakan di balik perubahan kebijakan ekonomi.
2. Analisis Tematik Liputan Media dan Wawancara Pakar: Peneliti kualitatif dapat menganalisis liputan media, artikel berita, dan wawancara ahli untuk menangkap persepsi, reaksi, dan debat publik seputar perubahan kebijakan ekonomi pascapemilu di Indonesia. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, narasi, dan wacana berulang yang membentuk wacana publik dan pembentukan opini tentang isu-isu kebijakan ekonomi.
3. Studi Kasus Tanggapan dan Strategi Bisnis: Peneliti dapat melakukan studi kasus kualitatif terhadap bisnis yang beroperasi di Indonesia untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan strategi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan ekonomi pascapemilu. Melalui wawancara dengan para pemimpin bisnis, pemangku kepentingan, dan pakar industri, para peneliti dapat memperoleh wawasan tentang dampak pergeseran kebijakan ekonomi pada operasi

bisnis, keputusan investasi, daya saing pasar, dan keberlanjutan jangka panjang.

HASIL PENELITIAN

Implikasi Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu terhadap Dunia Usaha di Indonesia: Sebuah Wacana Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap dunia usaha, mempengaruhi perekonomian, lingkungan bisnis, dan dinamika pasar. Teori Pilihan Publik dan Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan ini mempengaruhi dunia usaha dan memberikan masukan bagi strategi bagi pembuat kebijakan dan dunia usaha. Memahami motivasi di balik pengambilan kebijakan dapat membantu dunia usaha mengantisipasi potensi dampak dan menyesuaikan strategi mereka. Pasca pemilu, dunia usaha mungkin akan mengambil pendekatan menunggu dan melihat, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar. Proses demokrasi di Indonesia sering kali menyebabkan perubahan kebijakan ekonomi, sehingga menciptakan peluang dan tantangan bagi dunia usaha. Lensa teoritis untuk menganalisis implikasi kebijakan meliputi Teori Pilihan Publik, Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Kebijakan Perdagangan, dan Kebijakan Regulasi. Dengan memahami implikasi ini, dunia usaha dapat mengembangkan strategi proaktif, seperti perencanaan skenario dan teori ketergantungan sumber daya, untuk mengantisipasi hasil kebijakan, beradaptasi dengan peluang, dan memitigasi risiko.

Tantangan yang Dihadapi Dunia Usaha dalam Beradaptasi terhadap Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu di Indonesia: Sebuah Perspektif Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi Indonesia pasca pemilu menghadirkan tantangan besar bagi dunia usaha, yang mengharuskan mereka menyesuaikan operasi, investasi, dan strategi mereka untuk menavigasi peraturan dan lingkungan pasar yang terus berkembang. Teori Kelembagaan dan Ekonomi Biaya Transaksi dapat membantu dunia usaha mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Peraturan baru atau perubahan kebijakan dapat meningkatkan biaya kepatuhan, sehingga mengharuskan dunia usaha untuk menginvestasikan sumber daya dalam memahami dan menerapkan persyaratan peraturan. Ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam lingkungan peraturan dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi dan peningkatan biaya transaksi. Dunia usaha mungkin perlu berinvestasi pada personel khusus, konsultan eksternal, teknologi, atau infrastruktur untuk memenuhi persyaratan peraturan. Teori Manajemen Strategis menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis perubahan lingkungan, seperti perencanaan skenario serta ketangkasan dan fleksibilitas. Alat-alat ini membantu dunia usaha mengantisipasi potensi konsekuensi dari skenario kebijakan dan mengembangkan rencana darurat untuk berbagai hasil.

Strategi Mitigasi Dampak Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu dan Memanfaatkan Peluang di Indonesia: Sebuah Perspektif Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi Indonesia pasca pemilu menghadirkan ketidakpastian dan tantangan bagi dunia usaha, sehingga memerlukan langkah-langkah proaktif dan strategi adaptif. Teori Ketergantungan Sumber Daya dan Teori Manajemen Strategis digunakan untuk memitigasi dampak-dampak ini dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul. Teori Ketergantungan Sumber Daya menekankan organisasi mengandalkan sumber daya eksternal untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan, sedangkan Teori Manajemen Strategis menawarkan wawasan tentang perencanaan skenario, manajemen risiko, dan inovasi. Prinsip-prinsip ini membantu dunia usaha bersiap menghadapi potensi perubahan kebijakan, beradaptasi dengan cepat, dan mengambil keputusan yang tepat demi kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang. Teori Pilihan Publik, Ekonomi Biaya Transaksi, dan Teori Inovasi juga digunakan untuk memitigasi ketidakpastian. Perencanaan skenario membantu dunia usaha mengantisipasi hasil kebijakan dan mengembangkan rencana darurat, sementara advokasi mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan.

PEMBAHASAN

Implikasi Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu bagi Bisnis di Indonesia: Sebuah Wacana Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu dapat memiliki implikasi mendalam bagi bisnis yang beroperasi di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, lingkungan bisnis, dan dinamika pasar. Diskusi ini mengeksplorasi implikasi spesifik dari perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu untuk bisnis di Indonesia melalui lensa teoritis, termasuk Teori Pilihan Publik dan Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi. Dengan menganalisis teori-teori ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana perubahan kebijakan berdampak pada bisnis dan menginformasikan strategi untuk pembuat kebijakan dan bisnis.

Teori Pilihan Publik

Teori Pilihan Publik meneliti bagaimana aktor politik, termasuk pembuat kebijakan dan pejabat terpilih, membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka, seperti pemilihan ulang, bukan semata-mata untuk kebaikan publik (Kitschelt & Wilkinson, 2007). Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini dapat membantu menganalisis bagaimana prioritas pemerintahan baru mempengaruhi keputusan kebijakan dan implikasinya terhadap bisnis. Dengan memahami motivasi di balik keputusan kebijakan, bisnis dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan dalam lingkungan peraturan. Misalnya, jika pemerintahan baru memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, bisnis dapat melihat insentif untuk memperluas tenaga kerja mereka atau berinvestasi dalam industri yang selaras dengan tujuan pemerintah. Di sisi lain, jika fokus bergeser

ke arah kelestarian lingkungan, bisnis mungkin perlu menyesuaikan praktik mereka untuk mematuhi peraturan yang lebih ketat (Arvidsson & Dumay, 2022). Teori Pilihan Publik menawarkan kerangka kerja untuk memprediksi pergeseran ini dan memposisikan bisnis secara strategis untuk berkembang dalam lanskap kebijakan yang berubah (Williams, 2015).

Selain itu, Teori Pilihan Publik menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan upaya lobi dalam membentuk hasil kebijakan. Bisnis dapat memanfaatkan pengaruh dan upaya advokasi mereka untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung kepentingan mereka dan mengurangi dampak buruk dari perubahan kebijakan pasca-pemilu (Flöthe, 2019). Melalui partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan, bisnis dapat membentuk lingkungan peraturan dan mempromosikan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan dan daya saing mereka.

Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi

Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi berpendapat bahwa ketidakpastian seputar perubahan dalam kebijakan ekonomi dapat menyebabkan bisnis menunda investasi, mengurangi perekrutan, dan mengalami perlambatan ekonomi secara keseluruhan (Bloom, 2014). Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini menyoroti bagaimana ketidakpastian kebijakan berdampak pada kepercayaan bisnis, keputusan investasi, dan dinamika pasar. Setelah pemilihan, bisnis mungkin menghadapi ketidakpastian yang meningkat mengenai arah kebijakan masa depan, yang mengarah pada perilaku investasi yang hati-hati dan keengganan untuk memperluas operasi. Perubahan kebijakan, seperti perubahan dalam kebijakan fiskal, moneter, atau perdagangan, dapat memperkenalkan volatilitas dan ketidakpastian ke dalam lingkungan bisnis, mempengaruhi perencanaan bisnis dan proses pengambilan keputusan. Misalnya, setelah pemilihan presiden baru-baru ini di Indonesia, bisnis di sektor manufaktur ragu-ragu untuk berinvestasi dalam peningkatan peralatan dan teknologi baru karena ketidakpastian seputar potensi perubahan dalam kebijakan perdagangan (Anas et al., 2022). Kehati-hatian ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan produksi dan terbatasnya peluang penciptaan lapangan kerja dalam industri. Akibatnya, banyak bisnis dalam sektor manufaktur terpaksa menilai kembali strategi mereka dan menyesuaikan anggaran mereka untuk memperhitungkan dampak potensial dari kebijakan baru. Beberapa perusahaan memilih untuk menunda rencana ekspansi atau menunda mempekerjakan karyawan baru sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang arah pemerintah. Periode ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi bisnis yang mencoba memperkirakan permintaan, mengelola rantai pasokan, dan membuat keputusan investasi jangka panjang (Cohen & Kouvelis, 2021). Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan harus gesit dan mudah beradaptasi untuk menavigasi lanskap bisnis yang berubah dan tetap kompetitif di pasar.

Perspektif Wacana Teoritis

Proses demokrasi Indonesia sering mengantarkan perubahan kebijakan ekonomi, menciptakan lingkungan dinamis yang penuh dengan peluang dan tantangan bagi bisnis. Wacana ini mengeksplorasi kerangka teoritis yang dapat menjelaskan konsekuensi potensial dari perubahan kebijakan pasca-pemilu ini untuk bisnis yang beroperasi di Indonesia.

Lensa Teoritis untuk Menganalisis Implikasi Kebijakan

Teori Pilihan Publik: (Buchanan & Tullock, 1965) menunjukkan bahwa aktor politik memprioritaskan tindakan yang menguntungkan peluang pemilihan ulang mereka. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perubahan kebijakan mungkin mencerminkan prioritas pemerintahan baru, yang berpotensi berdampak pada sektor-sektor tertentu:

- Kebijakan yang Menguntungkan: Jika pemerintah baru memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konstruksi dan bisnis terkait mungkin mendapat manfaat dari peningkatan kontrak pemerintah.
- Pergeseran Sektoral: Fokus baru pada kelestarian lingkungan dapat mengarah pada peraturan yang lebih ketat untuk industri yang mencemari sambil memberi insentif kepada bisnis energi terbarukan.

Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi: (Baker et al., 2016) menunjukkan bahwa ketidakpastian seputar perubahan kebijakan ekonomi dapat menyebabkan:

- Penundaan Investasi: Bisnis mungkin menunda investasi karena ketidakpastian tentang kondisi ekonomi masa depan dan potensi pengembalian investasi.
- Mengurangi Kepercayaan Bisnis: Ketidakpastian dapat mengikis kepercayaan bisnis, yang mengarah ke pendekatan yang lebih hati-hati terhadap ekspansi dan perekrutan.

Implikasi untuk Bisnis: Pandangan Multifaset

- Kebijakan Fiskal: Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan perpajakan dapat berdampak pada permintaan agregat dan belanja konsumen. Keynesian Economics (Keynes, 1937) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang kegiatan ekonomi, berpotensi menguntungkan bisnis yang melayani konsumsi domestik. Sebaliknya, kenaikan pajak dapat menyebabkan penurunan daya beli konsumen, berdampak pada bisnis yang bergantung pada permintaan domestik.
- Kebijakan Moneter: Penyesuaian suku bunga dan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi keputusan investasi dan biaya bisnis. The Quantity Theory of Money (Friedman & Schwartz, 2008) menunjukkan bahwa perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi inflasi, berdampak pada

biaya input bisnis dan strategi penetapan harga. Suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong pinjaman untuk investasi, sementara suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat rencana ekspansi lebih mahal.

- Kebijakan Perdagangan: Penyesuaian tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan dapat memengaruhi biaya impor, peluang ekspor, dan persaingan. Teori perdagangan internasional seperti Comparative Advantage (Ricardo, 2005) menunjukkan bahwa negara-negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang dapat mereka ciptakan dengan paling efisien. Perubahan kebijakan dapat memengaruhi kemampuan bisnis untuk bersaing di pasar global atau mengakses sumber daya penting. Misalnya, pengurangan hambatan perdagangan dapat membuka pasar ekspor baru, sementara kenaikan tarif impor mungkin membuatnya lebih mahal untuk mendapatkan bahan dari luar negeri.
- Kebijakan Regulasi: Perubahan peraturan dan izin usaha dapat mempengaruhi biaya kepatuhan dan efisiensi operasional. Teori Kelembagaan (Scott, 2008) menekankan peran institusi dalam membentuk perilaku ekonomi. Peraturan baru dapat menciptakan ketidakpastian dan beban kepatuhan, terutama untuk bisnis kecil. Peningkatan peraturan mungkin memerlukan investasi tambahan dalam langkah-langkah kepatuhan, yang berdampak pada profitabilitas.

Alat Teoritis untuk Tindakan Strategis

Dengan memahami implikasi potensial melalui lensa teoritis ini, bisnis dapat mengembangkan strategi proaktif:

- Perencanaan Skenario: Pendekatan ini, didasarkan pada Teori Manajemen Strategis (Jasper & Crossan, 2012), membantu bisnis mengantisipasi berbagai hasil kebijakan dan mengembangkan rencana kontinjensi yang sesuai. Dengan mempertimbangkan skenario kebijakan yang berbeda, bisnis dapat dipersiapkan untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang atau mengurangi potensi risiko.
- Teori Ketergantungan Sumber Daya: (Pfeffer & Salancik, 2015) menekankan pengamanan sumber daya penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini untuk mengeksplorasi strategi seperti diversifikasi atau kemitraan untuk mengurangi potensi gangguan dalam ketersediaan sumber daya karena perubahan kebijakan.

Tantangan yang Dihadapi Bisnis dalam Beradaptasi dengan Perubahan Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu di Indonesia: Sebuah Perspektif Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia dapat menghadirkan tantangan signifikan bagi bisnis, mengharuskan mereka untuk menyesuaikan operasi, investasi, dan strategi mereka untuk menavigasi lingkungan peraturan dan pasar yang berkembang (Sarjito, 2023). Diskusi ini mengkaji tantangan utama yang dihadapi oleh bisnis dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia melalui lensa teoritis Teori Kelembagaan dan Ekonomi Biaya Transaksi. Dengan menganalisis teori-teori ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh bisnis dan menginformasikan strategi untuk pembuat kebijakan dan bisnis.

Teori Kelembagaan

Teori Kelembagaan menekankan peran lembaga, seperti peraturan dan hukum, dalam membentuk perilaku dan hasil ekonomi. Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini menyoroti bagaimana peraturan baru dan pengaturan kelembagaan dapat menciptakan ketidakpastian dan beban kepatuhan bagi bisnis, menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi secara efektif (Pierskalla, 2022). Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan biaya untuk bisnis. Memahami dampak perubahan kelembagaan terhadap perilaku ekonomi dapat membantu bisnis mengantisipasi dan menavigasi tantangan, serta menginformasikan pembuat kebijakan tentang potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan baru (Campbell, 2004). Selain itu, Teori Kelembagaan dapat menjelaskan pentingnya lembaga yang stabil dan transparan dalam membina lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Melalui lensa ini, bisnis dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan.

Ekonomi Biaya Transaksi

Ekonomi Biaya Transaksi berfokus pada biaya yang terkait dengan melakukan transaksi bisnis, termasuk biaya koordinasi, pemantauan, dan penegakan hukum (Dixit, 1998). Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini menyoroti bagaimana perubahan kebijakan dapat berdampak pada biaya transaksi untuk bisnis, mempengaruhi profitabilitas dan daya saing mereka. Selain itu, Ekonomi Biaya Transaksi menunjukkan bahwa ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam lingkungan peraturan dapat meningkatkan biaya transaksi untuk bisnis, karena mereka mengeluarkan sumber daya untuk menavigasi kompleksitas dan ketidakpastian peraturan. Bisnis mungkin menghadapi tantangan dalam meramalkan dan mengelola risiko peraturan, yang mengarah ke biaya transaksi yang lebih tinggi dan mengurangi efisiensi.

Perspektif Wacana Teoritis

Demokrasi Indonesia yang dinamis sering membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi, menciptakan lingkungan yang dinamis namun menantang bagi bisnis. Wacana ini mengeksplorasi kerangka teoritis yang menerangi hambatan yang dihadapi bisnis ketika beradaptasi dengan perubahan pasca-pemilihan ini.

Memahami Lanskap Tantangan

Ketidakpastian Regulasi: Administrasi baru sering memperkenalkan perubahan pada peraturan dan prosedur perizinan. Teori Kelembagaan (Scott, 2008) menekankan bagaimana institusi, seperti peraturan, membentuk perilaku ekonomi. Ketidakpastian seputar perubahan ini dapat menciptakan tantangan yang signifikan bagi bisnis:

- **Kesulitan Perencanaan:** Bisnis berjuang untuk merencanakan masa depan tanpa pemahaman yang jelas tentang lanskap peraturan baru. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam keputusan investasi dan menghambat pertumbuhan secara keseluruhan.
- **Beban Kepatuhan:** Peraturan baru sering memerlukan langkah kepatuhan tambahan, meningkatkan biaya administrasi dan mengalihkan sumber daya dari kegiatan bisnis inti.

Peningkatan Biaya Transaksi: Perubahan peraturan atau struktur pajak dapat menyebabkan peningkatan biaya yang terkait dengan melakukan transaksi bisnis. Transaction Cost Economics (Williamson, 2007) menekankan biaya-biaya ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas. Bisnis mungkin menghadapi:

- **Biaya Administrasi yang Lebih Tinggi:** Peningkatan dokumen, biaya lisensi, atau audit kepatuhan dapat secara signifikan berdampak pada laba bisnis.
- **Mengurangi Efisiensi Operasional:** Menavigasi peraturan yang kompleks dapat memperlambat operasi dan menghambat produktivitas.

Volatilitas Pasar: Perubahan kebijakan dapat menciptakan fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan belanja konsumen. Teori Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi (Baker et al., 2016) menunjukkan ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan:

- **Kesulitan Peramalan Permintaan:** Bisnis berjuang untuk memprediksi permintaan di masa depan karena volatilitas pasar, sehingga sulit untuk merencanakan tingkat produksi dan manajemen inventaris.
- **Keragu-raguan Investasi:** Bisnis ragu-ragu untuk berinvestasi dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti, berpotensi menghambat prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pada akses ke Keuangan Perubahan kebijakan yang berdampak pada lembaga keuangan atau peraturan pinjaman dapat mempersulit bisnis untuk

mengakses pembiayaan. Resource Dependence Theory (Pfeffer & Salancik, 2015) menyoroti bagaimana organisasi mengandalkan sumber daya eksternal untuk bertahan hidup. Jika perubahan kebijakan membatasi akses ke kredit, bisnis mungkin kesulitan untuk:

- Rencana Ekspansi Dana: Bisnis mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan untuk ekspansi atau usaha baru, membatasi potensi pertumbuhan mereka.
- Kelola Arus Kas: Peningkatan biaya yang terkait dengan adaptasi terhadap kebijakan baru dapat membebani arus kas bisnis, yang berpotensi menyebabkan kesulitan keuangan.

Hambatan Perdagangan: Penyesuaian kebijakan perdagangan, termasuk tarif atau kuota, dapat mengganggu rantai pasokan dan berdampak pada biaya impor/ekspor. Teori perdagangan internasional seperti Comparative Advantage (Ricardo, 2005) menunjukkan bahwa negara-negara mengkhususkan diri berdasarkan efisiensi. Perubahan kebijakan dapat membatasi kemampuan bisnis untuk:

- Bahan Sumber: Peningkatan biaya impor atau pembatasan bahan tertentu dapat menghambat proses produksi.
- Akses Pasar Ekspor: Hambatan perdagangan baru di pasar sasaran dapat membatasi kemampuan bisnis untuk mengeksport produknya, yang berdampak pada perolehan pendapatan.

Alat Teoritis untuk Analisis

Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya bisnis untuk menyesuaikan strategi mereka. Teori Manajemen Strategis (Jasper & Crossan, 2012) menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan yang berubah:

- Perencanaan Skenario: Pendekatan ini membantu bisnis mengantisipasi konsekuensi potensial dari skenario kebijakan yang berbeda, memungkinkan mereka untuk mengembangkan rencana kontinjensi untuk berbagai hasil.
- Kelincahan dan Fleksibilitas: Bisnis dapat mengadopsi struktur organisasi yang fleksibel dan proses pengambilan keputusan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan peraturan dan kondisi pasar.

Strategi untuk Mengurangi Dampak Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu dan Memanfaatkan Peluang di Indonesia: Sebuah Perspektif Teoritis

Perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia dapat menciptakan ketidakpastian dan tantangan bagi bisnis, mengharuskan mereka untuk mengadopsi langkah-langkah proaktif dan strategi adaptif untuk menavigasi lanskap yang berkembang secara efektif. Diskusi ini mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan bisnis untuk mengurangi dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu dan memanfaatkan peluang yang muncul di Indonesia melalui lensa teoritis Teori Ketergantungan Sumber Daya dan Teori

Manajemen Strategis. Dengan menganalisis teori-teori ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang strategi yang efektif bagi bisnis untuk berkembang di tengah ketidakpastian kebijakan dan kondisi pasar yang dinamis.

Teori Ketergantungan Sumber Daya

Menurut Teori Ketergantungan Sumber Daya, organisasi bergantung pada sumber daya eksternal untuk bertahan hidup dan tumbuh, dan ketergantungan mereka pada aktor dan sumber daya eksternal mempengaruhi keputusan strategis mereka. Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini menyoroti bagaimana bisnis dapat memanfaatkan pendekatan strategis seperti diversifikasi atau kemitraan strategis untuk mengamankan akses ke sumber daya penting yang mungkin terkena dampak perubahan kebijakan. Selain itu, Resource Dependence Theory menekankan pentingnya kemitraan strategis dan aliansi dalam mengakses sumber daya dan kemampuan yang saling melengkapi. Bisnis dapat berkolaborasi dengan perusahaan lain, asosiasi industri, atau lembaga pemerintah untuk mengumpulkan sumber daya, berbagi risiko, dan memanfaatkan kekuatan kolektif dalam menavigasi tantangan peraturan dan memanfaatkan peluang yang muncul (Wang et al., 2020).

Teori Manajemen Strategis

Teori Manajemen Strategis mencakup berbagai kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan kompetitif perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Jasper & Crossan, 2012). Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi pasca-pemilu di Indonesia, teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis dapat mengembangkan perencanaan skenario, manajemen risiko, dan pendekatan inovasi untuk menavigasi ketidakpastian kebijakan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selain itu, Teori Manajemen Strategis menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan. Bisnis dapat menerapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko untuk memantau perkembangan peraturan, menilai dampaknya terhadap operasi bisnis, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat.

Perspektif Wacana Teoritis

Siklus pemilu Indonesia yang sering membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi, menciptakan lingkungan yang dinamis untuk bisnis. Wacana ini mengeksplorasi kerangka teoritis yang dapat memandu bisnis dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menavigasi ketidakpastian ini dan berkembang dalam lanskap yang berkembang.

Alat Teoritis untuk Mitigasi

- Teori Pilihan Publik: (Buchanan & Tullock, 1965) menunjukkan bahwa pembuat kebijakan memprioritaskan tindakan yang menguntungkan peluang pemilihan ulang mereka. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini dengan

memahami prioritas administrasi baru dan menyelaraskan operasi mereka sesuai dengan itu. Misalnya, jika pemerintah baru menekankan pembangunan infrastruktur, bisnis di bidang konstruksi atau sektor terkait dapat memposisikan diri untuk memanfaatkan kontrak potensial.

- **Ekonomi Biaya Transaksi:** (Williamson, 2007) berfokus pada biaya yang terkait dengan melakukan transaksi bisnis. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya kepatuhan karena peraturan baru. Dengan merampingkan proses internal dan mengadopsi teknologi yang efisien, bisnis dapat meminimalkan biaya ini dan mempertahankan profitabilitas.

Alat Teoritis untuk Kapitalisasi

Dalam teori ketergantungan sumber daya, (Pfeffer & Salancik, 2015) menekankan pengamanan sumber daya penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini untuk memanfaatkan peluang yang timbul dari perubahan kebijakan:

- **Liberalisasi Pasar:** Jika kebijakan baru membuka pasar baru atau mengurangi pembatasan perdagangan, bisnis dapat memanfaatkan Teori Ketergantungan Sumber Daya dengan memperoleh sumber daya secara strategis atau membangun kemitraan di pasar yang baru diakses ini.

Dalam teori manajemen strategis, (Jasper & Crossan, 2012) menawarkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru. Bisnis dapat memanfaatkan:

- **Teori Inovasi:** Perubahan kebijakan dapat mendorong inovasi di sektor-sektor tertentu. Bisnis dapat memanfaatkan teori ini dengan memfokuskan upaya penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang yang selaras dengan perubahan kebijakan ini, berpotensi menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang.

Strategi Efektif

Pada perencanaan Skenario, pendekatan ini, didasarkan pada Teori Manajemen Strategis, membantu bisnis mengantisipasi berbagai hasil kebijakan dan mengembangkan rencana kontinjensi yang sesuai. Dengan mempertimbangkan skenario kebijakan yang berbeda, bisnis dapat dipersiapkan untuk:

- **Identifikasi Peluang:** Jika perubahan kebijakan memberi insentif pada energi terbarukan, bisnis dengan keahlian dalam energi tradisional dapat mengembangkan rencana darurat untuk beralih ke solusi terbarukan, memanfaatkan peluang pasar baru.

- Mengurangi Risiko: Jika perubahan kebijakan meningkatkan hambatan perdagangan, bisnis dapat mengembangkan strategi sumber alternatif atau mendiversifikasi pasar ekspor mereka untuk mengurangi potensi gangguan.

Pada advokasi teori pilihan publik menunjukkan bahwa bisnis dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Bisnis dapat terlibat dalam advokasi berbasis bukti, menyoroti bagaimana kebijakan spesifik dapat menguntungkan tidak hanya operasi mereka tetapi juga ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dari perubahan yang diusulkan dan berpotensi mengarah pada kebijakan yang mendorong lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Teori Ekonomi Publik dan Teori Ekonomi Publik tentang Perubahan Ekonomi di Indonesia memberikan wawasan berharga mengenai perubahan perekonomian swasta di negara ini. Dengan memahami peran keputusan pemerintah dan perubahan kebijakan dalam operasi bisnis, bisnis dapat mengembangkan strategi berdasarkan informasi untuk memaksimalkan potensi dan memanfaatkan sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini dapat membantu dunia usaha menganalisis perubahan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi untuk masa depan perekonomian Indonesia. Teori Ekonomi Publik dan Ekonomi Transaksi Publik juga memberikan wawasan berharga mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha dalam beradaptasi terhadap perubahan ekonomi swasta di Indonesia. Dengan memahami kebijakan dan peraturan pemerintah, dunia usaha dapat mengembangkan intervensi yang ditargetkan dan strategi adaptif untuk meningkatkan kehadiran mereka dalam lingkungan ekonomi yang dinamis. Teori Manajemen Strategis menawarkan strategi bagi bisnis untuk mengelola perubahan ekonomi swasta dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Teori Ekonomi Publik dapat diterapkan pada perekonomian swasta di Indonesia, membimbing dunia usaha untuk memahami keputusan pemerintah dan perubahan kebijakan. Hal ini membantu mereka mengembangkan strategi proaktif, menganalisis perubahan untuk pengambilan keputusan, mengembangkan intervensi yang ditargetkan, mengadopsi strategi adaptif, dan menerapkan praktik manajemen strategis. Dengan tetap mendapat informasi tentang perubahan peraturan, dunia usaha dapat memaksimalkan potensi mereka dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dengan terus memantau kondisi pasar dan menyesuaikan strategi, dunia usaha dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya di pasar Indonesia. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, dunia usaha dapat menavigasi kompleksitas pasar Indonesia, memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, dan mendorong kesuksesan jangka panjang.

PENELITIAN LANJUTAN

Kajian mengenai perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilu di Indonesia mempunyai beberapa keterbatasan. Fokusnya pada jangka waktu tertentu mungkin tidak mencakup seluruh perubahan kebijakan yang relevan

atau dampak penuhnya terhadap dunia usaha. Ketersediaan dan keandalan data mengenai perubahan ini mungkin terbatas karena akses publik dan potensi bias. Temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan di luar Indonesia karena dinamika kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Sifat kualitatif dari analisis ini mungkin kurang memiliki ketelitian statistik. Keterbatasan waktu dapat membatasi ketepatan waktu temuan. Faktor eksternal seperti tren ekonomi global dan bencana alam juga dapat mempengaruhi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C. T. (2022). The Indonesian economy in turbulent times. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 241–271.
- Arvidsson, S., & Dumay, J. (2022). Corporate ESG reporting quantity, quality and performance: Where to now for environmental policy and practice? *Business Strategy and the Environment*, 31(3), 1091–1110.
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636.
- Blais, A. (2000). *To vote or not to vote?: The merits and limits of rational choice theory*. University of Pittsburgh Pre.
- Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. *Journal of Economic Perspectives*, 28(2), 153–176.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1965). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy* (Vol. 100). University of Michigan press.
- Campbell, J. L. (2004). *Institutional change and globalization*. Princeton University Press.
- Cohen, M. A., & Kouvelis, P. (2021). Revisit of AAA excellence of global value chains: Robustness, resilience, and realignment. *Production and Operations Management*, 30(3), 633–643.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dixit, A. K. (1998). *The making of economic policy: A transaction-cost politics perspective*. MIT press.
- Flöthe, L. (2019). Technocratic or democratic interest representation? How different types of information affect lobbying success. *Interest Groups & Advocacy*, 8(2), 165–183.
- Friedman, M., & Schwartz, A. J. (2008). *A monetary history of the United States, 1867-1960* (Vol. 14). Princeton university press.
- Hidayat, R. (2019). Kendala Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 44(2), 135–158.
- Jasper, M., & Crossan, F. (2012). What is strategic management? *Journal of Nursing Management*, 20(7), 838–846.
- Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209–223.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, clients and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.

- Kuncoro, A., & Resosudarmo, B. (2018). Siklus Bisnis Politik, Volatilitas Pemilu, dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia*, 53(4), 285–306.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. (2020). *Strategy safari: The complete guide through the wilds of strategic management*. Pearson UK.
- Nugroho, A. (2019). Dampak Ketidakpastian Politik terhadap Investasi: Bukti dari Indonesia. *Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia*, 65(2), 159–178.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. (2015). External control of organizations – Resource dependence perspective. In *Organizational behavior 2* (pp. 355–370). Routledge.
- Pierskalla, J. H. (2022). *Democratization and the State: Competence, Control, and Performance in Indonesia's Civil Service*. Cambridge University Press.
- Pratama, A., & Wibowo, H. (2020). Strategi Bisnis di Pasar Dinamis: Pelajaran dari Indonesia. *Jurnal Internasional Strategi Bisnis*, 21(1), 45–63.
- Ricardo, D. (2005). From the principles of political economy and taxation. In *Readings in the economics of the division of labor: The classical tradition* (pp. 127–130). World Scientific.
- Sarjito, A. (2023). EVALUASI DAMPAK PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA. *Jurnal EBI*, 5(2), 1–10.
- Scott, W. R. (2008). Approaching adulthood: the maturing of institutional theory. *Theory and Society*, 37, 427–442.
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage publications.
- Siregar, R., & Miyazaki, T. (2020). Siklus Politik dan Kebijakan Pemerintah: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Ekonomi Asia Tenggara*, 37(1), 85–111.
- Utama, Y., & Rosadi, D. (2021). Perubahan Regulasi dan Strategi Adaptasi Bisnis: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Peraturan Bisnis*, 14(2), 205–228.
- Wang, Z., Zhang, Z., & Jhony, N. C. Y. (2020). Measurement of innovation resource allocation efficiency in civil–military integration enterprises. *Kybernetes*, 49(3), 835–851.
- Williams, L. K. (2015). It's all relative: spatial positioning of parties and ideological shifts. *European Journal of Political Research*, 54(1), 141–159.
- Williamson, O. E. (2007). *The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting*. Springer.